

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 179

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 179 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

## **WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 179 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA  
PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**WALI KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan ....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 156 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pendapatan Daerah adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan pendapatan Daerah pada Badan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelola Pendapatan Daerah kelas A pada Badan.

BAB III ....

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelola Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan ....

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- c. pemberian rekomendasi sesuai lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam ....

- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala Pasar wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB IV  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR  
UPTD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - b. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah;
  - d. membina ....



- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan perumusan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pengelolaan konsultasi perpajakan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data subjek pajak serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan;
- g. melaksanakan penetapan dan penerbitan prosedur hukum pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- h. melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- i. menyiapkan bahan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- k. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Badan serta mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelola Pendapatan Daerah secara administratif kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan;
- n. mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelola Pendapatan Daerah secara operasional kepada Kepala Badan melalui kepala bidang pada Badan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Pendapatan Daerah; dan
- p. melaksanakan ....

- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD membawahkan:
- a. subbagian tata usaha;
  - b. kelompok JF; dan
  - c. pelaksana

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelola Pendapatan Daerah;
  - b. melaksanakan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, pengarsipan, dan hubungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah dapat ditetapkan JF dan dibantu sejumlah kelompok JF sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11 ....

### Pasal 11

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah JF yang terbagi dalam kelompok JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Setiap pimpinan pada UPTD Pengelola Pendapatan Daerah wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 101 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

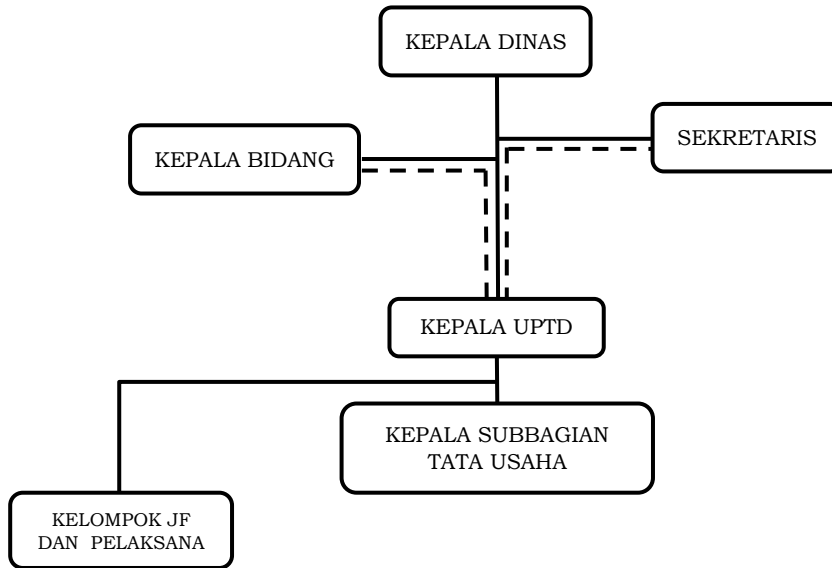
LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 179 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**



WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI